POSISI STRATEGIS KARANG TARUNA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

PEMILIH PEMULA

Susilastuti Dwi Nugrahajati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

susilastuti [dn@vahoo.com](mailto:dn@vahoo.com) Basuki Agus Suparno Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

[basuki.agus@gmail.com](mailto:basuki.agus@gmail.com) Adi Soeprapto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta adi [soeprapto@upnyk.ac.id](mailto:soeprapto@upnyk.ac.id)

Abstract

In Indonesia, political education is often understood partially to the size of its quantitative voter participation rates. Political education can not be interpreted solely on the use of the voting rights or the democratic party elections. Political education is essentially a long- term process towards the realization as active citizens in the process of nation building. In this kind of concept, the community and state will become a strong pillar of democracy. One of the objectives of political education is an early voters group, this group should not have a definite orientation of political choices and often become the target of election contestants. Misconception of their political understanding eventually make them became passive group at any stage of political process. In the process of political education toward early voters, one of which has a strategic position is opinion leaders, who are groups of people that have more knowledge than other community groups. Karang Taruna at Minggir village, Sleman regency become one of the opinion leaders in the political education process because they are actively involved in the electoral process and rural development planning process and Karang taruna activist are acting as the spearhead of this political education at local level.

Key words : political education, early voters, opinion leader, karang tarnna PENDAHULUAN

Pendidikan politik perlu dikembangkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang harus terlibat secara aktif dalam setiap proses politik yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan secara aktif harus diselaraskan sesauai dengan kapasitas masing-masing. Kesadaran ini semakin penting, mengingat pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat memberikan masukan kepada pemerintah dalam setiap proses pembuatan keputusan publik, antara lain melalui proses public hearing, pengaduan-pengaduan melalui webside resmi pemerintah, serta masukan melalui sarana media sosial.

Pendidikan politik memberi kesadaran bahwa politik adalah persoalan pengelolaan kepentingan publik yang baik. Ada banyak aktor politik yang dapat menjalankan peran dalam pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Pendidikan politik secara konstitusional dijalankan oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekolah, pendidikan tinggi, NGO, organisasi sosial kemasyarakatan dan seterusnya merupakan sumber pengetahuan politik bagi pemilih pemula. Namun platform pendidikan politik tidak sama dari aspek prioritas dan titik berat yang sama . Belum adanya platform yang sama dalam memberi titik tekan dan prioritas terhadap persoalan-persoalan apa yang dapat membangun kesadaran warganegara yang berkarakter.

Pemilih pemula sejak Pemilu 2014 menjadi kelompok strategis yang digarap secara khusus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain pemilih pemula kelompok strategis lain yang digarap KPU adalah kelompok perempuan, kelompok marginal, disabilitas dan kelompok agama.Untuk meningkatkan partisipasi pemilih kelompok ini dalam melakukan sosialisasi KPU dibantu relawan demokrasi. Ketika pemilu dai berbagai level selesai diselenggarakan maka pendidikan politik harus tetap dilakukan. Tentunya tidak bisa lagi mengandalkan relawan demokrasi karena mereka segera dibubarkan begitu pemilu legislatif telah selesai diselenggarakan.

Pendidikan politik yang diasumsikan bukan sekedar meningkatkan partisipasi pemilih perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah memiliki pemahaman politik yang lebih holistik. Untuk menjaga kontiunitas "virus" tentang politik ini perlu dilakukan sehingga masyarakat, khususnya pemilih pemula menjadi familiar terhadap hal-hal yang terkait politik, tidak hanya berhubungan dengan pemilihan umum.

Desa melek politik adalah salah satu teroboson untuk mengembangkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Dalam mengembangkan desa melek politik ini salah satu opinion leader yang bisa dioptimalkan perannya adalah Karang Taruna. Karang Taruna sebagai organisasi pemuda yang sudah sangat eksis sejak jaman pemerintahan Orde Baru perlu dioptimalkan perannya menjad ujung tombak bagi pendidikan politik di tingkat pedesaan. Penting kiranya untuk melihat bagaimana menempatkan Karang Taruna sebagai opinion leader di Desa Melek Politik

Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana peran Karang Taruna sebagai Opinion Leader pendidikan politik bagi pemilih pemula di Desa Melek Politik? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui menempatkan Karang Taruna sebagai opinion leader pendidikan politik bagi pemilih pemula di Desa Melek Politik, (2) Metode yang bisa dikembangkan Karang Taruna sebagai opinion leader bagi pendidikan politik pemilih pemula di desa melek politik.

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendidik insan manusia untuk mempunyai pengetahuan atas suatu hal kemudian dengan pengetahuan yang dimiliki maka akan membentuk sikap atau perilakunya atas suatu hal. Pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektis antara tiga aspek yakni pendidik, yang dididik dan realitas dunia. Masalah pertama dan kedua adalah subyek yang sadar, sementara masalah yang ketiga adalah obyek yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektif semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan yang mapan selama ini.

Fakih (2000) menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sarana untuk "memproduksi" kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan. Tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan ' ideologi yang dominant' yang tengah berlaku dimasyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem altematif kearah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidak adilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, obyektif maupun "detachmen " dari kondisi masyarakat.

Gagasan pendidikan kritis, sebagaimana yang dilansir Azra (2006) merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi, mengingat didalamnya terdapat proses transformasi realitas, termasuk realitas politik yang pada gilirannya bertujuan membentuk masyarakat sipil {civil society). Pertama, pendidikan merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan kekuasaan secara mendasar, karena pendidikan menjadi ajang terjalinnya makna, hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang apa sesungguhnya yang disebut manusia dan apa yang menjadi impiannya. Ketiga, pendidikan merupakan tempat untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan. Pendidikan juga menjadi ajang untuk menuangkan komitmen yang tinggi dari para pendidik guna menciptakan sistem politik yang emansipatif, bukan sekedar memenuhi tuntutan pedagogis semata.

Pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat mempunyai kesadaran sebagai warga negara. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun sebuah ikatan yang kokoh antara masyarakat dan negara (dalam hal ini semua komponen yang ada dalam negara) sehingga akan muncul sebuah relasi yang saling menguatkan.

Pendidikan politik dirujuk sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam. Pendidikan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik merupakan proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis yang diarahkan pada sistem tertentu. Pendidikan politik dapat berorientasi integratif dan berorientasi kelompok atau partai. Kedua sifat pendidikan ini menampakkan karakter yang berbeda namun menuju ke arah yang sama yaitu untuk kepentingan negara.

Soemarno (2002) mengemukakan, pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan (1) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai.

Penelitian tentang pendidikan politik dilakukan Estu Miyarso, (2009) melakukan penelitian tentang "Pendidikan Politik Mahasiswa (Studi Kasus Netralitas Ormawa UNY dalam Pemilu 2009) . Iqbal M Mujtahid dan Hascaryo (2013) melakukan penelitian tentang pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akutanbilitas. Melibatkan teman sebaya dalam pendidikan politik juga dikembangkan. Metode pendidikan sebaya (peer education) yang merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman yang yang memiliki usia sebaya . (Djamarah dalam Anggorowati, 2011),

Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemModel pengembangan pendidikan politik ini bagi pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan pada model pendidikan politik yang telah dirumuskan dalam penelitian Strategis Nasional tahun 2013 (Soeprapto,Susilastuti dan Supamo, 2013).

Salah satu sasaran pendidikan politik adalah pemilih pemula. Pemilih pemula bukanlah pemilih yang tidak mempunyai referensi politik sama sekali sehingga sering diasumsikan mereka merupakan kelompok pemilih yang masih bisa dengan mudah dipengaruhi orientasi politiknya. Mengacu pendapat Almond dan Verba (1990: 16 ) maka orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.

Setiajid (2011) menguraikan karakter pemilih pemula sebagai berikut: (1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) Peter Reason dalam Guba (2019) merupakan penelitian partisipatif yang paling banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial. Penelitian ini sangat penting terutama dalam memberi penekanan pada subyek yang diteliti untuk melakukan, memproduksi dan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan memberdayakan dan mencerahkan mereka melalui pendampingan dan keterrlibatan peneliti di dalam proses-proses produksi sosial tersebut.

Seperti yang dikatakan Reason (1994:328) bahwa penelitian partisipatoris berimplikasi pada sebuah usaha pada bagian masyarakat untuk memahami peran pengetahuan sebagai instrument kekuasaan dan control. Tujuan primer penelitian tindakan partisipatoris adalah melakukan pencerahan dan membangunkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan bersama dengan penelitinya.

Tujuan penelitian tindakan partisipatif mengarah pada dua hal sekaligus yakni: a) menghasilkan pengetahuan dan tindakan yang secara langsung berguna bagi kelompok masyarakat melalui penelitian, pendidikan orang dewasa, dan tindakan sosial politik. Kedua, penelitian ini melakukan pemberdayaan melalui konstruksi terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki. Proses ini dikenal dengan istilah: a process of self awareness through collective self inquiry and reflection (Reason, 1994:328)

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian tindakan partisipatif ini mencakup: desain riset, pengumpulan data, analisis data dan pada tahap berikutnya memunculkan proses-proses kolaboratif dan dialog yang memberdayakan, memotivasi, meningkatkan self esteem dan mengembangkan solidaritas komunitas.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah Karang Taruna di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggi, Kabupaten Sleman. Desa ini dipilih karena organisasi pemuda yang dilahirkan pada masa pemerintahan Orde Baru sangat aktif dan terlibat dalam berbagai proses pembangunan desa. Karang Taruna diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam proses pendidikan politik.

HASIL DANPEMBAHASAN

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Pendidikan politik berbeda dengan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih dilakukan hanya sebatas pada pemahaman bagaimana warga negara menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pendidikan politik sering rancu dengan pendidikan pemilih.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan sebagai leader untuk pelaksanan pendidikan politik, khususnya pada pemilih pemula. Dalam perkembangan nya, Karang Taruna tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga mewakili aspirasi pemuda dalam proses perencanaan program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan melakukan evaluasi, termasuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara aktivis Karang Taruna juga ambil bagian dalam pelaksanaan pemilu seperti menjadi anggota PPS tingkat Desa, relawan demokrasi pada pemilu 2014.

Pengalaman tersebut setidaknya menjadi modal aktivis Karang Taruna untuk mudah berinteraksi dengan masyarakat, terutama pemuda. Potensi yang dimiliki ini bila diasah dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang politik maka aktivis Karang Taruna bisa opinion leader tentang politik di wilayahnya. Aktivis Karang Taruna dengan pengalamannya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya pemilih pemula agar bisa memiliki sikap sebagai warga negara yang baik..

Berdasarkan hasil Focus Group Dissension (FGD) aktivis Karang Taruna di Desa Sendangsari Kecamatan Minggiir, Kabupaten Sleman mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum di berbagai level di wilayahnya. Mereka juga aktif dalam keguatan musyawarah desa yang membahas program-program pembangunan di desa, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

Aktivitas yang dilakukan oleh aktivis Karang Taruna pada dasarnya adalah aktivitas politik.Namun ketika dilontarkan pertanyaan tentang pemahaman politik, sejauh mana memantau hasil pemilu mereka masih sangat terbatas. Politik masih dipahami sebatas pemilu setelah itu selesai. Mereka belum ada inistiatif untuk memantau hasil pemilu bahkan menagih janji politik yang pernah disampaikan para kandidat.

Ketidakmampuan mengawal proses politik sampai tuntas menyebabkan muncul persepsi yang kurang baik tentang proses pergantian kekuasaan paling kontitusional ini. Dalam persepsi peserta FGD, janji politik tidak pernah direalisasikan dengan baik bahkan sangat bertolak belakang. Salah satu contohnya, pada saat kampanye, kandidat menjanjikan mendorong masyarakat yang sebagian besar petani dengan berbagai pembangunan infrastruktur pendukung. Namun setelah terpilih, justru banyak lahan pertanian yang diijinkan beralih fiingsi sebagai perumahan.

Berdasarkan pemahaman itu maka prosesnya pendidikan politik dilakukan bersifat nurture. Artinya proses pendidikan politik ini memang harus dilakukan secara terencana, struktur dan berdasarkan pada indicator-indikator tertentu sebagai tolak ukur pencapaiannya.

Pendidikan politik dilakukan dalam tataran level kognitif, pembentukan sikap dan perilaku politik. Secara spesifik tujuan pendidikan politik dilakukan dalam kaitannya dengan kondisi objektif dan subjektif terhadap situasi politik yang berkembang.

Untuk menyiapkan aktivis Karang Taruna bisa menjadi opinion leader bagi pemilih pemula tentang politik maka mereka diberikan pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan politik secara konseptual, ideologi bangsa Pancasila, tata hirearki undang-undang, tahapan- tahapan penjaringan aspirasi masyarakat, peyusunan proposal kegiatan, implementasi politik dalam keseharian, Metode yang bisa digunakan adalah metode ceramah, role playing maupun diskusi-diskusi terbatas. Karang Taruna bisa memanfaatkan sarana pertemuan formal yang telah berkembang sebelumnya.

Akitivis Karang Taruna bisa menggunakan pertemuan-pertemuan informal untuk menjaring aspirasi warga sebelum dibawa ke jenjang tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Pengetahuan manajemen, organisasi juga perlu diberikan. Sangat holistiknya persoalan yang berhubungan dengan politik. Pengetahuan dan skill yang sangat holistik akan memudahkan perasn Karang Taruna untuk menularkan virus tentang politik.

KESIMPULAN

1. Pendidikan politik berbeda dengan pendidikan pemilih sehingga pemilihan kontent sangat diperlukan agar tidak ada kekeliruan pemahaman.
2. Pendidikan politik akan menyasarpada level kognitif, pembentukan sikap dan perilalaku politik.
3. Aktivis Karang Taruna bisa dimanfaatkan untuk menjadi opinion leader atau pemuka pendapat tentang politik bagai kelompok pemilih pemula.

REFERENSI

Azra, Azyumardi, 2006, Paradigma baru Pendidikan Nasional : Rekonstruksi dan Demokratisasi Cet.2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Fakih, Mansour, 2000, Pendidikan Popular (Membangun Kesadaran Kritis), Cetakan Pertama, Desember, REaD Book, Yogyakarta.

Firdaus, Mohammad, 2003, Dampak Pendidikan Politik yang dilakukan PPSW terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah (Studi Kasus Anggota Kelompok Perempuan Melati di Pondok Rangon , Tesis, Program Studi Sosiologi, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia

Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park: Sage.

KPU Provinsi DIY, 2011, Pemilu 2009, Pemilukada 2010 dan 2011 di Provinsi DIY dalam angka, Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi. 1999, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Press

Makalunsenge, Indrus dkk, 2014, Pengaruh Reklame Politik Pilwako terhadap Sikap Pemilih Pemula di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Jurnal Acta Diurna, Vol. IILNo 3 tahun 2014

Mantra, Ida Bagoes, 2004, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.